



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO CAHYO DEWI OKTORI
2. Jabatan : STAF
3. NHK : 677334

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.896.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/13 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/14 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/71 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.546.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 660.000.000

1. MOBIL, NISAN MART CITY CAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL 2.5 CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV TURBO 1.5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 300.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.108.727

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.986.108.727

III. HUTANG

Rp. 2.200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.786.108.727



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.